



**BPK PERWAKILAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

LAPORAN KINERJA

Tahun 2023

KATA PENGANTAR



Sebagai salah satu unit pelaksana tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku unsur penyelenggara negara, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan wajib menyusun Laporan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja Tahun 2023 ini merupakan cermin dari pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selama Tahun 2023.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan disusun dengan memedomani Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 286/K/X-XII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Kinerja Tahun 2023 ini memuat pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya Laporan Kinerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Banjarbaru, 31 Januari 2024
Kepala Perwakilan


/ **Rahmadi S.E., M.M., Ak., CA, CSFA** 
NIP. 196812101996031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang	6
B. Tugas Dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	6
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	8
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.....	10
E. Isu Strategis.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Perencanaan Strategis.....	21
B. Target Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Hasil Evaluasi AKIP.....	31
B. Capaian Kinerja Tahun 2023	33
IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.....	41
IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	42
IKU 3. Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.....	43
IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	44
IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	46
IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal.....	47
IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.....	48
IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP.....	50
IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	51
IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan.....	53
IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	55
IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	57
IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran.....	58

C. Analisis Efisiensi	60
D. Perubahan Budaya Kerja	64
E. Realisasi Anggaran	64
F. Inovasi.....	66
G. Penghargaan	67
BAB IV PENUTUP.....	68
A. Pencapaian Skor Kinerja Tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Secara Umum.....	68
B. Strategi Pemecahan Masalah serta Rencana Aksi Pemenuhan Target Periode Berikutnya.....	68
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi	10
Gambar 2 Alur Pikir Renstra BPK Perwakilan Kalimantan Selatan 2020-2024.....	21
Gambar 3 Visualisasi Renstra BPK 2020-2024.....	23
Gambar 4 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Kalimantan Selatan 2020-2024	24
Gambar 5 Tren Skor Kinerja Tahun 2021-2023	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi SDM	10
Tabel 2 Rincian Pagu RKP	15
Tabel 3 Rincian Pagu RKSP	15
Tabel 4 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023	26
Tabel 5 Rencana Aksi Tahun 2023	26
Tabel 6 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tahun 2023	34
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021, 2022, dan 2023	37
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Lima Tahun	39
Tabel 9 Perkembangan capaian IKU 1 Tahun 2020-2024	41
Tabel 10 Perkembangan capaian IKU 2 Tahun 2020-2024	42
Tabel 11 Perkembangan capaian IKU 3 Tahun 2020-2024	43
Tabel 12 Perkembangan capaian IKU 4 Tahun 2020-2024	45
Tabel 13 Perkembangan capaian IKU 5 Tahun 2020-2024	47
Tabel 14 Perkembangan capaian IKU 6 Tahun 2020-2024	47
Tabel 15 Perkembangan capaian IKU 7 Tahun 2020-2024	49
Tabel 16 Perkembangan capaian IKU 8 Tahun 2020-2024	50
Tabel 17 Perkembangan capaian IKU 9 Tahun 2020-2024	52
Tabel 18 Perkembangan capaian IKU 10 Tahun 2020-2024	53
Tabel 19 Perkembangan capaian IKU 11 Tahun 2020-2024	55
Tabel 20 Perkembangan capaian IKU 12 Tahun 2020-2024	57
Tabel 21 Perkembangan capaian IKU 12 Tahun 2020-2024	58
Tabel 22 Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Tahun 2023	65
Tabel 23 Daftar Penghargaan Internal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	67
Tabel 24 Daftar Penghargaan Eksternal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka disusunlah Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) VI. Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memuat indikator dan target kinerja Tahun 2023 yang kemudian dituangkan dalam Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja. Realisasi dari rencana aksi dinilai secara triwulanan. Untuk menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, maka perlu disusun Laporan Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun 2023 dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja serta upaya mengatasi permasalahan tersebut.

Cara penilaian pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi pencapaian suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target IKU yang telah ditetapkan pada PK Tahun 2023.

B. Tugas Dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Dalam pelaksanaan tugasnya, AKN VI didukung antara lain oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selaku unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN VI dalam melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah

pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, BUMD dan Lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi (AUI). Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS0 pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan

oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksaan yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada AUI;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemuktahiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Database Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas.

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta

sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Sumber Daya Manusia, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Teknologi Informasi dan Subbagian Hukum.

2. Subauditorat Kalimantan Selatan I

Lingkup tugas Subauditorat Kalimantan Selatan I adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut,

3. Subauditorat Kalimantan Selatan II

Lingkup tugas Subauditorat Kalimantan Selatan II adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Subauditorat Kalimantan Selatan I dan II adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- c. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- d. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- e. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- g. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
- h. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

- j. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- k. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Kelompok Pejabat Fungsional

Kelompok Pejabat Fungsional bertugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1 Struktur Organisasi

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

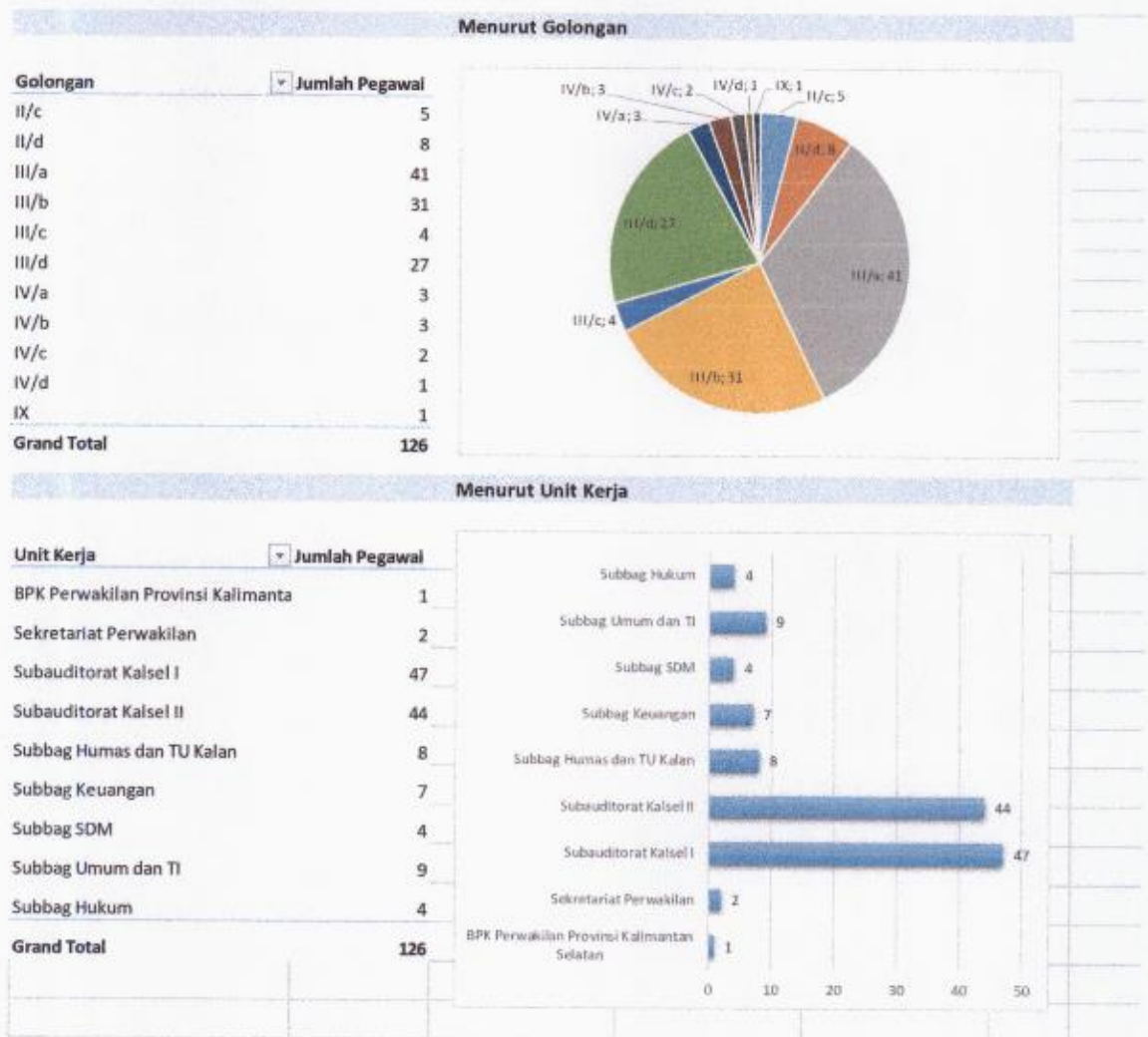
Berdasarkan data per 31 Desember 2023 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki SDM sebanyak 144 orang, dengan rincian sebagai berikut.

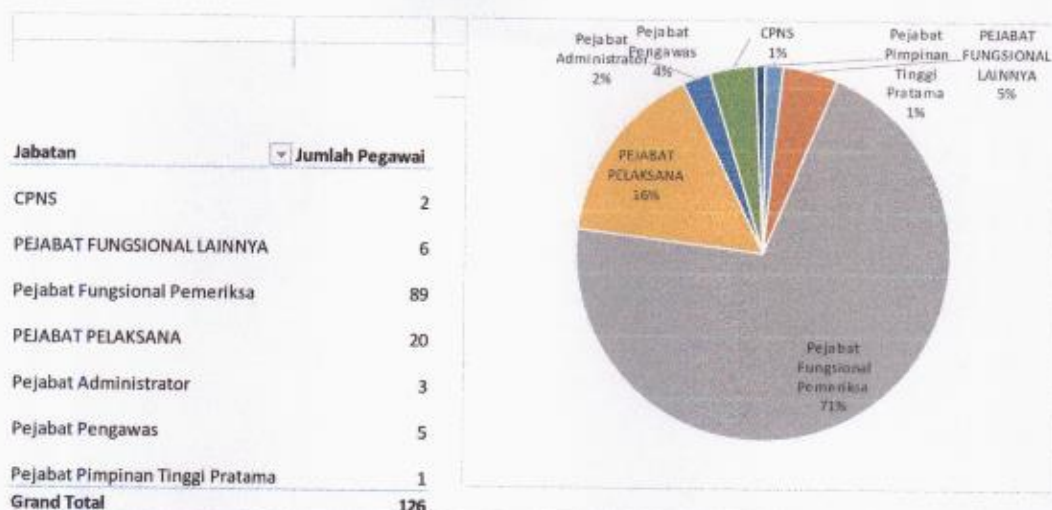
Tabel 1 Komposisi SDM

Uraian	Jumlah (orang)
Kepala Perwakilan	1
Kepala Subauditorat	2
Kepala Sekretariat Perwakilan	1
Kepala Subbagian	5

Uraian	Jumlah (orang)
Pemeriksa	89
Fungsional Selain Pemeriksa	5
Pelaksana	20
CPNS	2
Tenaga Tidak Tetap	19
Jumlah	144

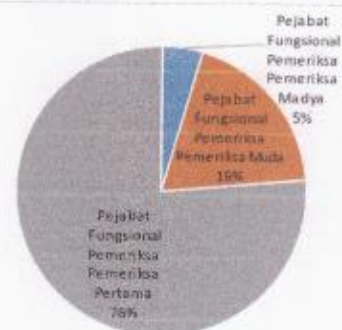
1.1 Statistik Pegawai Tetap





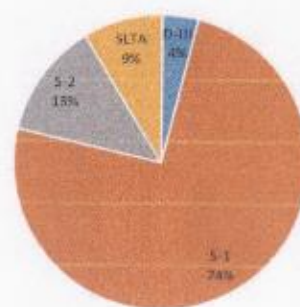
Menurut Jabatan Fungsional Pemeriksa

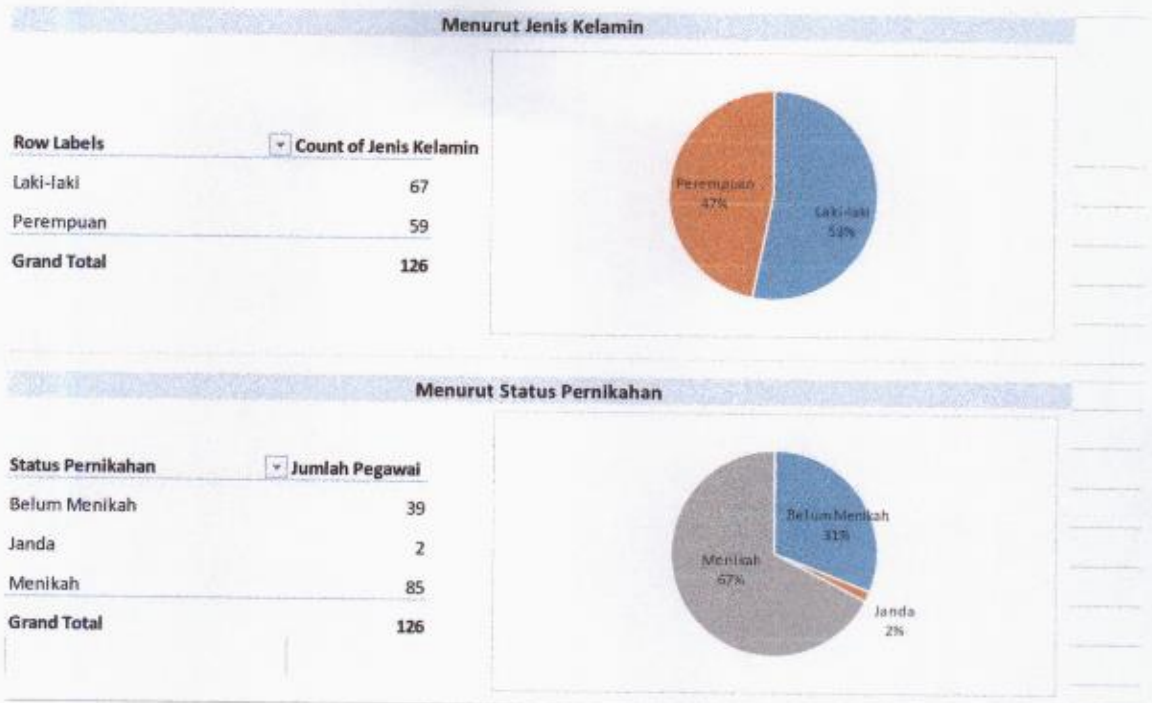
Detile Jabatan	Jumlah Pegawai
Pejabat Fungsional Pemeriksa	89
Pemeriksa Madya	4
Pemeriksa Muda	17
Pemeriksa Pertama	68
Grand Total	89



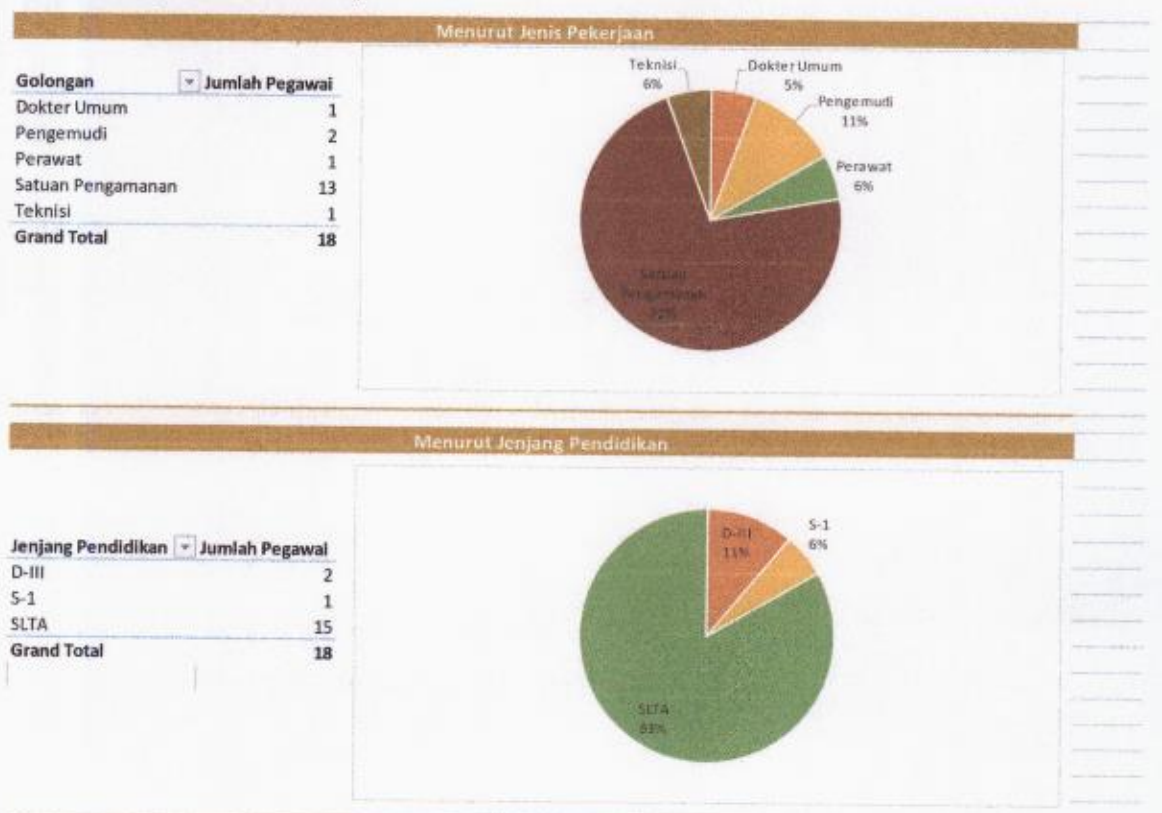
Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
D-III	5
S-1	94
S-2	16
SLTA	11
Grand Total	126



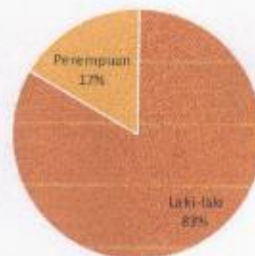


1.2 Statistik Pegawai Tidak Tetap



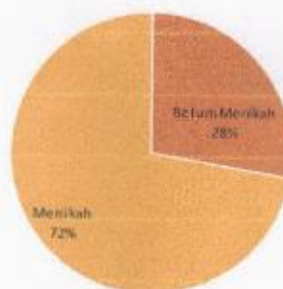
Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
Laki-laki	15
Perempuan	3
Grand Total	18



Menurut Status Pernikahan

Jabatan	Jumlah Pegawai
Belum Menikah	5
Menikah	13
Grand Total	18



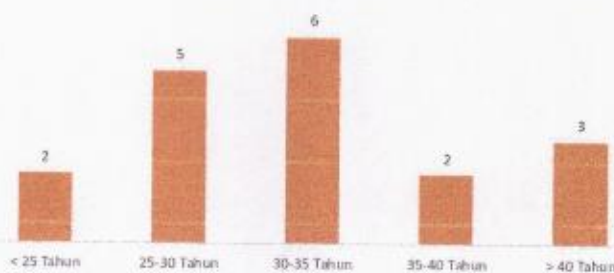
Agama

Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
Islam	18
Grand Total	18



Rentang Usia

Rentang Usia	Jumlah Pegawai
< 25 Tahun	2
25-30 Tahun	5
30-35 Tahun	6
35-40 Tahun	2
> 40 Tahun	3
Grand Total	18



2. Sumber Daya Keuangan

Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh pagu anggaran awal (DIPA Awal) sebesar Rp23.677.786.000,00 yang terdiri dari anggaran untuk kegiatan pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) sebesar Rp7.652.399.000,00 dengan target keluaran 261 laporan dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) sebesar Rp16.025.387.000,00 dengan target 166 laporan. Adapun rincian anggaran RKP dan RKSP tersebut dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2 Rincian Pagu RKP

No	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran
1	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	243.525.000	132 LHP
2	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	8.885.000	1 Laporan
3	Sumbangan IHPS Perwakilan	48.906.000	2 Laporan
4	Laporan Profil Entitas Perwakilan	13.631.000	14 Laporan
5	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan	122.350.000	28 Laporan
6	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan	219.488.000	28 Laporan
7	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	260.910.000	12 Laporan
8	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	3.804.882.000	22 LHP
9	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	2.929.822.000	22 Laporan
Jumlah		7.652.399.000	261 Laporan

Tabel 3 Rincian Pagu RKSP

No	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran
1	Layanan Perkantoran	14.131.392.000	1 Layanan
a	Gaji dan Tunjangan	10.149.199.000	
b	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.982.193.000	
1)	Layanan Perkantoran Bidang TU	253.404.000	
2)	Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan	38.400.000	
3)	Layanan Perkantoran Bidang SDM	552.333.000	
4)	Layanan Perkantoran Bidang Keuangan	227.712.000	
5)	Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI	2.631.554.000	
6)	Layanan Dukungan Sekretariat Perwakilan	278.790.000	
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	480.869.000	145 Unit
3	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.413.126.000	20 Laporan
a	Layanan Tata Usaha	103.932.000	

No	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran
b	Layanan Kehumasan	166.074.000	
c	Layanan SDM	239.364.000	
d	Layanan Keuangan	263.156.000	
e	Layanan Umum dan TI	306.503.000	
f	Layanan Hukum	185.205.000	
g	Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK	66.600.000	
h	Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	82.292.000	
Jumlah		16.025.387.000	166 Laporan

E. Isu Strategis

Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 telah mengidentifikasi isu strategis yang menjadi perhatian, sebagai berikut.

1. Pemeriksaan merespons isu lokal dan berdasarkan pengaduan serta pemanfaatan informasi publik.

Salah satu upaya yang akan dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam menilai dan mendorong perbaikan terhadap program pembangunan pemerintah adalah dengan menyelaraskan tema pemeriksaan BPK dengan agenda pembangunan yang menjadi fokus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2024 dengan mempertimbangkan implementasi agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada masing-masing agenda tersebut. Upaya penyelarasan tema pemeriksaan tersebut dilaksanakan melalui Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Semester II Tahun 2023, yang mencakup:

- 1) Pemeriksaan Tematik Nasional, terdiri dari:
 - (1) Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Instansi Terkait Lainnya;
 - (2) Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Instansi Terkait Lainnya;
 - (3) Pelaksanaan Program Mobilitas Penduduk & Penataan Permukiman Kumuh dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Tahun Anggaran

2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Banjarmasin dan Instansi Terkait Lainnya;

- (4) Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banjar dan Instansi Terkait Lainnya;
 - (5) Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Instansi Terkait Lainnya; dan
 - (6) Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Kelapa Sawit Rakyat Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Instansi Terkait Lainnya).
- 2) Pemeriksaan Tematik Lokal yakni Operasional Bank Tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2023 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dan
 - 3) Pemeriksaan Mandiri, terdiri dari:
 - (1) Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,
 - (2) Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - (3) Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Balangan;
 - (4) Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - (5) Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Kebijakan pemeriksaan ini merupakan bentuk peran aktif BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam menerapkan perbaikan berkelanjutan pada tingkat lokal. Hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam penyelesaian masalah-masalah lokal maupun pencapaian tujuan pembangunan di daerah.

Upaya pemenuhan isu strategis ini tercermin pada **IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional** dan **IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal**.

2. Peningkatan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memuat opini, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi sesuai dengan jenis

pemeriksaan yang dilakukan. Untuk menghasilkan LHP yang berkualitas dan bermanfaat bagi lembaga perwakilan (DPRD Provinsi, Kota, dan Kabupaten) dan pimpinan entitas yang diperiksa (Gubernur, Walikota, dan Bupati) serta pemangku kepentingan lainnya, kualitas QC dan QA harus ditingkatkan secara berjenjang, secara internal dari Ketua Tim, Pengendali Teknis dan/atau Wakil Penanggung Jawab, dan Penanggung Jawab, dan secara eksternal dari Direktorat EPP dan Inspektorat Utama.

Upaya pemenuhan isu strategis ini tercermin pada **IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.**

3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perlu Ditingkatkan

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan apresiasi pimpinan entitas atas hasil pemeriksaan BPK. Selain itu tingkat tindak lanjut juga dapat menunjukkan efektivitas rekomendasi sebagai langkah perbaikan atas permasalahan yang ditemukan. Tingkat tindak lanjut yang rendah oleh pemangku kepentingan dapat dibaca sebagai rendahnya apresiasi pimpinan entitas terhadap hasil pemeriksaan BPK atau rekomendasi perbaikan atas permasalahan yang ditemukan sulit dan atau tidak dapat diterapkan oleh entitas.

Upaya pemenuhan isu strategis ini tercermin pada **IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.**

4. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan program peningkatan/pengembangan kompetensi pegawai secara reguler sebagai kebijakan yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, melaksanakan pengembangan kompetensi, dan melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi.

Untuk tahapan pelaksanaan pengembangan kompetensi, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan pengembangan kompetensi berupa diklat secara mandiri, paling sedikit 1 (satu) kali setahun untuk pemeriksa selama 40 sampai dengan 50 Jam Pelatihan (JP), dan sesuai dengan jadwal diklat setiap triwulan dari Badiklat PKN. Selain itu, peningkatan kompetensi ASN dilakukan melalui

kegiatan workshop, *Focus Group Discussion* (FGD), dan forum berbagi pengetahuan lainnya yang harus semakin sering dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme ASN. Untuk tahapan evaluasi pengembangan kompetensi, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan evaluasi administratif untuk melihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi. Hal tersebut dilakukan dengan monitoring dan evaluasi pencapaian jam diklat setiap bulan, triwulan, dan tahunan.

Upaya pemenuhan isu strategis ini tercermin pada **IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi** dan **IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan**.

5. Terdapat komponen penilaian kinerja anggaran yang belum tepat dan dinamika kegiatan yang memengaruhi pencapaian realisasi anggaran.

Kinerja pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dicantumkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berikut Rincian Kertas Kerja Satker (RKKS) atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) diukur dan dievaluasi secara berkala oleh Biro Keuangan dan Direktorat PSMK serta dan Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen terus meningkatkan kualitas perbendaharaan dengan meningkatkan pengendalian intern untuk meningkatkan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, dengan mengikutsertakan manajemen dan pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan anggaran satuan kerja mulai dari merencanakan anggaran kebutuhan yang dibutuhkan satuan kerja untuk mencapai kinerja yang direncanakan, dengan menerapkan kombinasi pendekatan *Zero Based Budgeting* (ZBB) dan *Performance Based Budgeting* (PBB).

Upaya pemenuhan isu strategis ini tercermin pada **IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran**.

6. Integrasi Sistem Informasi BPK

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi dan Informasi (TI), BPK telah mengembangkan aplikasi, antara lain e-KKP (*e-Working Paper*) yang

termasuk dalam aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pemeriksaan (SiAP). SiAP LKPD merupakan awal penerapan e-KKP yang pada awalnya digunakan untuk pemeriksaan atas LKPD.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menggunakan aplikasi SiAP LKPD pada semua entitas pemeriksaan LKPD, yakni sebanyak 14 (empat belas) entitas yang terintegrasi dengan aplikasi tersebut.

Selain aplikasi SiAP, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) yaitu aplikasi penginputan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah diterapkan pada seluruh entitas, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala eksternal (mutasi pegawai pada entitas pemeriksaan, minimnya kemampuan jaringan internet di daerah) yang perlu pembinaan secara berkesinambungan.

Selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah memanfaatkan aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) yang digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas Pemeriksa pada tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan lapangan, dan pelaporan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menggunakan aplikasi SMP untuk penginputan penugasan, tindak lanjut, dan data pemeriksaan.

Upaya pemenuhan isu strategis ini tercermin pada **IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu satker pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPK serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK. Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 disusun selaras dengan Renstra BPK 2020-2024 dalam rangka meningkatkan peran dan manfaat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan bagi para pemangku kepentingan yang didukung dengan penguatan kapasitas organisasi. Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 dapat diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 2 Alur Pikir Renstra BPK Perwakilan Kalimantan Selatan 2020-2024

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah **“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”**. Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan proses bisnis utama. Oleh karena perannya yang

semakin luas, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Dalam rangka mencapai visi misi tersebut, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Dukungan pada pernyataan misi pertama yaitu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mengoptimalkan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

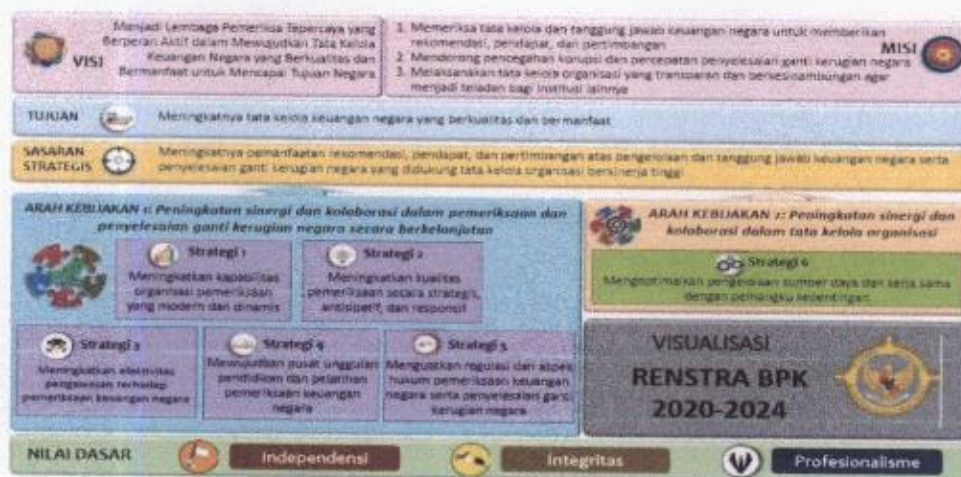
Dukungan pada misi kedua yaitu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan berperan aktif mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan percepatan penyelesaian ganti kerugian.

Dukungan pada misi ketiga yaitu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berupaya mewujudkan penguatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola melalui reformasi birokrasi sebagai komitmen melakukan perbaikan dan peningkatan dalam organisasi. Upaya ini diwujudkan dengan optimalisasi sumber daya organisasi pada setiap aspek, mengembangkan budaya integritas, independen dan profesional, serta mengimplementasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik dalam mendukung penguatan nilai tambah organisasi.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan **“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”**. Selaras dengan tujuan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tujuan **“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”**. Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Sasaran Strategis 2020-2024 **“Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”**. Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ingin menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang sesuai dengan standar sehingga diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja BPK.

Selanjutnya, untuk mencapai Sasaran Strategis, BPK merumuskan arah kebijakan dan strategi. Bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi dapat dilihat pada gambar berikut.



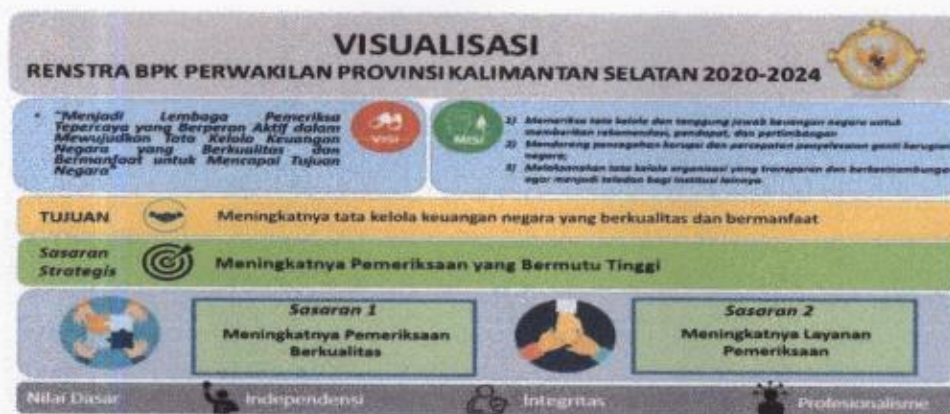
Gambar 3 Visualisasi Renstra BPK 2020-2024

Sebagai unit kerja pemeriksaan pada AKN VI, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung Strategi 2 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif dan Responsif”** yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level insight dan foresight, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan implementasi SDG’s sebagai agenda internasional.

Dalam Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Sasaran Strategis untuk meningkatkan pemeriksaan yang bermutu tinggi dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemeriksaan berkualitas; dan
2. Meningkatnya layanan pemeriksaan.

Bentuk visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 adalah sebagai berikut.



Gambar 4 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Kalimantan Selatan 2020-2024

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “**Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi**”, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan indikator-indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
8. Hasil Evaluasi AKIP;
9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan
13. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran.

B. Target Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun indikator dan target kinerja Tahun 2023 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan Auditor Utama

Keuangan Negara VI, serta diketahui oleh Ketua BPK, Wakil Ketua BPK dan Anggota VI BPK.

Berikut Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan, Sasaran	Anggaran		Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp23.677.786.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas; dan	Rp9.065.525.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	Rp14.612.261.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%

			10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
			11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
			12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
			13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88,50%

Tabel 4 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023

2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian masing-masing indikator yang telah divalidasi secara periodik yang terdapat dalam Rencana Aksi. Berikut rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2022 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut.

Tabel 5 Rencana Aksi Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama		Target	Rencana Aksi Tahun 2023
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	- Melakukan penyusunan tim pemeriksaan dan melaksanakan diklat pemeriksaan; - Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP); - Melaksanakan reviu berjenjang dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi	100%	- Melakukan Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2023; - Melaksanakan review berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan

Indikator Kinerja Utama		Target	Rencana Aksi Tahun 2023
	Harapan Penugasan		pemeriksaan sesuai harapan, penugasan yang tertuang dalam P2; Melakukan pembahasan bersama antara PJ, WPJ, PT, dan tim untuk menetapkan opini.
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	- Melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan inspektorat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait posisi TLRHP dan rencana aksi penyelesaiannya; - Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL.
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	- Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional; - Melaksanakan koordinasi perubahan Pemeriksaan LFAR dengan memperhatikan kebijakan pimpinan; - Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan tematik nasional sesuai RKP TA 2023 yaitu pada Pemeriksaan PDDT maupun Kinerja; - Melaksanakan pemeriksaan terinci tematik nasional sesuai RKP TA 2023 yaitu pada Pemeriksaan DTT maupun Kinerja.
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	- Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; - Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan; - BPK Perwakilan Kalimantan Selatan berkomitmen untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan setelah memperoleh persetujuan dari Pimpinan dan dukungan anggaran yang memadai dari BPK Pusat.
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	- Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal; - Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal; - Melaksanakan pemeriksaan tematik lokal sesuai RKP TA 2023; - Melaksanakan serah terima kertas kerja pemeriksaan dari pemeriksa kepada kepala subauditorat (pejabat struktural

Indikator Kinerja Utama		Target	Rencana Aksi Tahun 2023
			pemeriksa/PSP) setelah dilakukan revidi berjenjang antara tim pemeriksa serta direvidi oleh PSP sesuai persyaratan <i>quality assurance</i> (QA).
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	• Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD; • Pengarahan Kepala Perwakilan terkait Integritas Independensi Profesionalisme (IIP); • Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BerAKHLAK dan nilai-nilai dasar BPK serta budaya kerja; • Memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai terkait implementasi visi, misi, dan nilai dasar BPK dalam berorganisasi di setiap kegiatan pembinaan oleh pimpinan sebelum pemeriksaan LKPD;
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	89,00	• Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2023; • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku; • Menyusun laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja Tahun 2022; • Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2022 kepada Itama untuk dievaluasi; • Melakukan penilaian mandiri melalui e-SAKIP; • Menyampaikan dokumen tindak lanjut hasil evaluasi Itama atas laporan sistem akuntabilitas kinerja satuan kerja Tahun 2022.
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	• Pimpinan mendorong melaksanakan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persuratan, dsb (SIAP LK, SIAP Banparpol).

Indikator Kinerja Utama		Target	Rencana Aksi Tahun 2023
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	- Evaluasi Penerapan <i>Best Practice</i> (BP) Tahun 2022 - Inventarisir usulan BP di BPK Perwakilan; - Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan; - Menyampaikan usulan BP kepada Ditama Revbang (Direktorat PSMK); - Menyampaikan usulan replikasi BP kepada Ditama Revbang (Direktorat PSMK); - Menyusun Laporan Manajemen Pengetahuan secara periodik.
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	- Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit; - Melaksanakan survei tingkat kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan publik yang diberikan BPK Perwakilan.
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	- Mengajukan usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; - Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai; - Menyelenggarakan diklat di perwakilan, yaitu Diklat Pemeriksaan LKPD TA 2022 serta membuat laporannya; - Menyusun monitoring pemenuhan jam diklat pegawai berdasarkan sertifikat diklat, workshop, beranda ilmu, dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang telah disetujui Badiklat PKN.
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88,50%	- Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2023 dan Kebijakan TA. 2023; - Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran; - Menyusun data capaian output secara periodik; - Menyusun RKA Tahun 2024 berdasarkan Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran;

Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Aksi Tahun 2023
		Mengikuti kegiatan Forum Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Forjala).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Evaluasi AKIP

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah.

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap lima komponen Akuntabilitas Kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 mendapatkan nilai sebesar **88,00** dengan predikat **A (Memuaskan)**. Perolehan nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021 yang mendapatkan nilai sebesar **92,30** dengan predikat **AA (Sangat Memuaskan)**. Uraian hasil reuvi AKIP Tahun 2023 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut.

a. Perencanaan Kinerja

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki dokumen perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, indikator kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound* (SMART) dan cukup, serta menggunakan penjenjangan kinerja hingga ke level individu dengan logis. Perencanaan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil organisasi yang berkesinambungan dan selalu dilakukan evaluasi. Perencanaan penganggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah mendukung kinerja dimana proses penyusunan, penelitian, dan reviunya telah menggunakan aplikasi Proses RKA.

b. Pengukuran Kinerja

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah memanfaatkan portal kolaborasi untuk penyampaian data/dokumen dan menggunakan aplikasi PRISMA untuk pengukuran kinerja yang dimonitor secara triwulanan. Selain itu, terdapat upaya inovatif pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang layak menjadi percontohan antara lain "Tamu Kita Sebagai Wadah Layanan Penerima Tamu Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi" yang telah diterapkan sejak Mei 2022 dan telah direplikasi oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Tahun 2023.

c. Pelaporan Kinerja

LAKIN BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 telah disusun sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 serta Nota Dinas Kepala Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja Nomor 38/ND/XII.1/01/2023, namun belum sepenuhnya menyajikan informasi kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. Namun demikian, evaluasi dalam LAKIN telah dimanfaatkan untuk menyempurnakan perencanaan kinerja tahunan tahun berikutnya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memadai yang setiap tahun mengikuti kegiatan Forum Pengelola Renstra dalam rangka mengevaluasi indikator dan target kinerja serta mengikuti sharing knowledge untuk meningkatkan kinerja. Namun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti.

Atas hasil evaluasi tersebut Itama merekomendasikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan agar:

- a. Berkoordinasi dengan Biro SDM untuk menyempurnakan cascading kinerja dari satuan kerja hingga ke level individu sesuai dengan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- b. Meningkatkan kualitas penyusunan LAKIN Tahun 2023 dengan menambah informasi kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

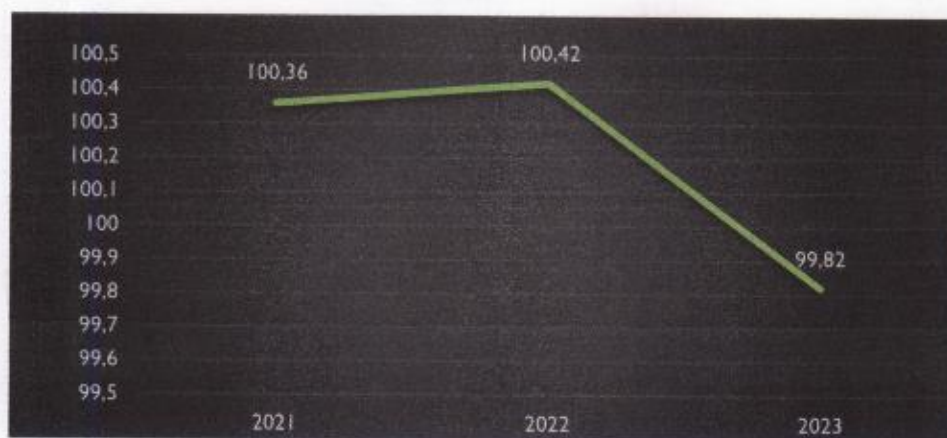
B. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengelolaan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dimulai dari penetapan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pengukuran atas capaian target yang telah ditetapkan tersebut dilakukan secara berkala melalui Aplikasi PRISMA meliputi proses penginputan, validasi, dan reviu data input. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan bersama Direktorat PSMK melakukan pengukuran secara bertahap dari mulai proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pencapaian Sasaran Strategis ini dinilai melalui 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka capaian kinerja Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan beberapa kegiatan meliputi.

- a. Melakukan validasi atas target kinerja Tahun 2023;
- b. Menyusun rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2023;
- c. Melakukan monitoring pencapaian kinerja Tahun 2023;
- d. Melakukan inventarisasi atas permasalahan pencapaian kinerja pada tahun berjalan; dan
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam mendorong pencapaian kinerja dan mengatasi kendala yang dihadapi.

Pada Tahun 2023, skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 99,82. Skor tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar 100,36. Skor capaian kinerja menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut.



Gambar 5 Tren Skor Kinerja Tahun 2021-2023

Dari gambar diatas menunjukkan penurunan skor kinerja dibandingkan dengan capaian dua tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari penurunan skor beberapa IKU yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan melalui penguatan sinergi antara Pengelola Kinerja dan Manajemen BPK Perwakilan serta dukungan seluruh Pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Perbandingan Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan PRISMA BPK RI Tahun 2023 yang meliputi pencapaian 13 IKU terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagai berikut.

Tabel 6 Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tahun 2023

Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja		Tahun 2023		
		Target PK	Realisasi	Skor
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	82%	82
1.1	Hasil QA dan QC Satker (Bobot 40%)		100%	
1.2	Hasil Evaluasi EPP (Bobot 60%)		70%	
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
2.1	Jumlah LHP yang simpulannya sesuai dengan harapan penugasan		12	
2.2	Jumlah LHP yang diterbitkan		12	
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	78,69%	104,92
3.1	Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti		11.288	
3.2	Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti		2.757	
3.3	Jumlah rekomendasi belum ditindaklanjuti		426	
3.4	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		466	

Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja		Tahun 2023		
		Target PK	Realisasi	Skor
3.5	Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee		14.937	
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,85%	100,85
4.1	Realisasi pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya		6	
4.2	Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional		6	
4.3	Alokasi penambahan skor		0,85	
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
5.1	(REF) Jumlah pemeriksaan dari pemangku kepentingan yang disetujui dan dipenuhi oleh BPK, yang melibatkan pemeriksa di Satuan Kerja Pemeriksaan terkait			
5.2	Alokasi Penambahan Skor			
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,13%	100,13
6.1	Realisasi pemeriksaan tematik lokal		1	
6.2	Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal		1	
6.3	Alokasi penambahan skor		0,13	
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,70	94
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)	88,00	98,88
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	99,19%	101,21
9.1	Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM		99,71%	
9.2	Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN		95,10%	
9.3	Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP		100%	
9.4	Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP		100%	
9.5	Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL		99,93%	
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	115,83%	105
10.1	Tingkat Penyusunan/Penerapan Best Practice		120%	
10.2	Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan		111,67%	
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	4,22	105
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100
12.1	Jumlah pegawai yang telah memenuhi jam diklat		123	
12.2	Jumlah seluruh pegawai		123	
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88,50%	91,11%	102,1

Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target PK	Realisasi	Skor
Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)		85,74	
Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA)		92,28	
Skor Kinerja			99,82

Secara keseluruhan, perbandingan pencapaian skor kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Terdapat tiga Indikator Kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu.
 - a. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
 - b. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
 - c. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP.
2. Terdapat tiga Indikator Kinerja dengan capaian sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu.
 - a. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
 - b. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
 - c. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.
3. Terdapat tujuh Indikator Kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu.
 - a. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
 - b. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
 - c. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
 - d. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
 - e. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
 - f. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
 - g. IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran.

Adapun perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan realisasi tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2021, 2022, dan 2023

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Sasaran Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	82%	89,33%	90,67%
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%
	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	78,69%	80,11%	78,94%
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,85%	101,32%	100,43%
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja	100%	100,13%	100,48%	100,39%

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021
	dalam Pemeriksaan Tematik Lokal				
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,70	4,67	4,49
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	88,00	AA (92,30)	AA (93,14)
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	99,19%	93,56%	98,36%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	115,83%	120%	100%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,22	4,35	3,95
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88,00%	91,11%	89,32%	91,38%

Selanjutnya, perbandingan realisasi tahun pelaporan dengan target lima tahun sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Lima Tahun

No	Indikator Kinerja	Tahun Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	82%	Belum memenuhi
2.	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Memenuhi
3.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	78,69%	Memenuhi
4.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,85%	Memenuhi
5.	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Memenuhi
6.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100,13%	Memenuhi

No	Indikator Kinerja	Tahun Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
	dalam Pemeriksaan Tematik Lokal							
7.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,70	Belum Memenuhi
8.	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)	88,00	Belum Memenuhi
9.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	99,19%	Memenuhi
10.	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	115,83%	Memenuhi
11.	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	4,22	Memenuhi
12.	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Memenuhi
13.	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,50%	88%	88,50%	88,70%	91,11%	Memenuhi

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023. Adapun penjelasan capaian Indikator Kinerja selama Tahun 2023 secara keseluruhan sebagai berikut.

IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan dengan mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada dua tingkatan, yaitu internal satuan kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui Hasil Evaluasi EPP dan Hasil Reviu Itama. Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) dan QA dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksa (PSP). Hasil evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Perkembangan capaian IKU 1 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 9 Perkembangan capaian IKU 1 Tahun 2020-2024

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	89,29%	90,67%	89,33%	82%	-
Capaian Realisasi	89,29	90,67	89,33	82	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	89,29%	90,67%	89,33%	82%	-

Realisasi IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 sebesar 82% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 82%. Realisasi ini masih dibawah target yang ditetapkan Tahun 2023. Hal ini menunjukkan kendala yang dialami yaitu masih perlunya peningkatan atas kualitas LHP yang akan diterbitkan, dengan perbaikan kualitas reviu berjenjang dari Ketua Tim, Pengendali Teknis, Wakil Penanggung Jawab dan Penanggung Jawab

Capaian tersebut diukur melalui dua sub IKU, yaitu

- (1) Sub IKU 1.1 tentang Hasil QA dan QC dengan realisasi sebesar 100%;
- (2) Sub IKU 1.2 tentang Hasil Evaluasi EPP dengan realisasi sebesar 70%

Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan QA dan QC berjenjang atas 24 LHP yang telah diterbitkan. Selain itu, capaian Hasil Evaluasi LHP yang dilakukan oleh Direktorat Evaluasi dan Perencanaan Pemeriksaan (EPP) sebesar 70%. Capaian tersebut terdiri atas tingkat konsistensi atas LHP sebesar 35,71% dan tingkat akurasi LHP sebesar 70%. Capaian ini masih di bawah target yang telah ditetapkan yaitu

sebesar 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa dokumentasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan belum sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Realisasi Tahun 2023 menurun dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yaitu sebesar 82% atau belum memenuhi target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih adanya temuan konsistensi dan akurasi atas LHP yang diterbitkan. Adapun upaya yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan pencapaian salah satunya melaksanakan revidi berjenjang yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) dan Pejabat Struktural Pemeriksa (PSP). Untuk upaya perbaikan tahun selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam penyusunan LHP secara berjenjang dari Ketua Tim sampai dengan Penanggung Jawab sehingga dapat meningkatkan nilai perolehan evaluasi dan terus mengevaluasi pencapaian dan mengoptimalkan aktivitas yang telah direncanakan yang tertuang dalam rencana aksi.

Realisasi IKU 1 jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 82% atau belum memenuhi target yang diharapkan. Untuk ke depannya diharapkan capaian ini dapat ditingkatkan pada Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahunnya berusaha meningkatkan kualitas revidi hasil pemeriksaan agar diperoleh kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.

IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam LHP yang diterbitkan oleh satuan kerja pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator kinerja ini bertujuan untuk mendorong satuan kerja pemeriksaan agar meningkatkan kualitas LHP.

Tabel 10 Perkembangan capaian IKU 2 Tahun 2020-2024

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	-
Capaian Realisasi	100	100	100	100	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	-

Pencapaian IKU ini pada Tahun 2023 sebesar 100% atau telah memenuhi target yang telah ditetapkan 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 mencapai nilai yang sama dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan Laporan Evaluasi Direktorat EPP, simpulan dalam 24 LHP yang telah diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Kendala dalam pencapaian IKU ini adalah adanya keterbatasan waktu dalam pemeriksian, upaya yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencapai IKU ini adalah meningkatkan efektivitas waktu dalam pemeriksaan untuk memenuhi harapan penugasan yang tertuang dalam P2. Realisasi IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 100% atau telah memenuhi target yang diharapkan pada Tahun 2024. Upaya penyempurnaan/efisiensi untuk dapat mempertahankan pencapaian IKU ini kedepannya adalah dengan meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang dihasilkan.

IKU 3. Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada entitas yang diperiksa.

Tabel 11 Perkembangan capaian IKU 3 Tahun 2020-2024

IKU 3 Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	78,99%	78,94%	80,11%	78,69%	-
Capaian Realisasi	105	105	105	104,92	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	105%	105%	106,81%	104,92%	-

Pencapaian IKU ini pada Tahun 2023 sebesar 78,69% atau telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75% sehingga capaiannya 104,92%. Realisasi ini mengalami

penurunan dari realisasi Tahun 2022. Realisasi IKU 3 jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 telah memenuhi target. Kendala dalam mencapai IKU ini adalah kurangnya komitmen dan peran aktif entitas dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Upaya yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam memenuhi capaian IKU ini adalah dengan memanfaatkan secara penuh Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) dalam melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.

Adapun pencapaian IKU ini pada Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 11.288;
2. Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti sebanyak 2,757;
3. Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 426;
4. Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 466;
5. Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan kepada *auditee* sebanyak 14.937.

Data tersebut merupakan data yang bersumber dari Direktorat EPP berdasarkan data IHPS Semester I Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan secara optimis dapat memenuhi target sampai Tahun 2024 dengan terus berperan aktif dalam mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Upaya penyempurnaan/efisiensi yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat meningkatkan capaian IKU 3 Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan adalah dengan pemanfaatan teknologi dan informasi berupa Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) dan Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP). Manfaat yang diperoleh berupa kemudahan akses bagi satker dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Tabel 12 Perkembangan capaian IKU 4 Tahun 2020-2024

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100,82%	100,43%	101,32%	100,85%	-
Capaian Realisasi	100,82	100,43	101,32	100,85	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100,82%	100,43%	101,32%	100,85%	-

Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 sebesar 100% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 100,85% sehingga capaiannya 100,85%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 melebihi nilai pada tahun sebelumnya sebesar 100,32%. Realisasi IKU 4 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 100,85%. Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan pemeriksaan tematik nasional sebanyak 6 objek pemeriksaan yaitu.

1. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Instansi Terkait Lainnya;
2. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Instansi Terkait Lainnya;
3. Pemeriksaan Kinerja atas Pelaksanaan Program Mobilitas Penduduk & Penataan Permukiman Kumuh dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Banjarmasin dan Instansi Terkait Lainnya;
4. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banjar dan Instansi Terkait Lainnya;

5. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Instansi Terkait Lainnya;
6. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Kelapa Sawit Rakyat Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Instansi Terkait Lainnya.

Atas pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mendapat penambahan alokasi skor sebesar 0,85%.

Kendala dalam pencapaian IKU ini adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan sehingga BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan skala prioritas untuk alokasi anggaran pada pemeriksaan tematik nasional yang menjadi tema pemeriksaan sesuai Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan Badan dengan tetap memperhatikan pemeriksaan tematik lokal dan pemeriksaan mandiri untuk mendukung pemeriksaan *mandatory*.

Adapun upaya yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam mempertahankan atau meningkatkan IKU ini yaitu dengan merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan. Tema pemeriksaan tematik nasional yang akan ditetapkan Pimpinan BPK. Dari tema tersebut, dilakukan analisis berdasarkan perkembangan kondisi terkini untuk mendapatkan fokus pemeriksaan yang lebih rinci dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

Salah satu upaya penyempurnaan/efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan pemanfaatan teknologi dan informasi layanan Aplikasi Pemeriksaan berupa SIAP Kinerja. Manfaat yang diperoleh berupa kemudahan akses bagi satker dalam rangka penyelesaian dan arsip atas kerja kerja pemeriksaan.

IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini bertujuan mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK. Realisasi IKU 5 Tahun 2023 sebesar 100% telah

memenuhi target dari yang ditetapkan. Selama Tahun 2023, tidak ada permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.

Tabel 13 Perkembangan capaian IKU 5 Tahun 2020-2024

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	-
Capaian Realisasi	100	100	100	100	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	-

Upaya yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam mempertahankan atau meningkatkan IKU ini yaitu dengan mengomunikasikan kepada Pimpinan BPK dhi. Anggota VI melalui Auditor Utama KN VI dalam hal terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan mengalokasikan sumber daya manusia dan pembiayaan untuk memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan yang telah disetujui Pimpinan BPK

IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Tabel 14 Perkembangan capaian IKU 6 Tahun 2020-2024

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100,39%	100,48%	100,13%	-
Capaian Realisasi	100	100,39	100,48	100,13	-
Persentase Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024	100%	100,39%	100,48%	100,13%	-

Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 sebesar 100% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 100,13% sehingga capaiannya 100,13%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 mengalami penurunan dari sebesar 100,48% menjadi sebesar 100,13%.

Realisasi IKU 4 bila dibandingkan dengan target Tahun 2023 telah mencapai 100,13%. Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terlibat dalam satu pemeriksaan tematik lokal yaitu Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Bank Tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2023 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Atas pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mendapat penambahan alokasi skor sebesar 0,13%.

Kendala dalam pencapaian IKU ini adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan sehingga BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan skala prioritas, prioritas pertama dialokasikan anggaran pada pemeriksaan tematik nasional yang menjadi tema pemeriksaan sesuai Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan Badan; prioritas berikutnya adalah alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal; dan prioritas selanjutnya adalah pemeriksaan mandiri untuk mendukung pemeriksaan *mandatory*.

Adapun upaya yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam mempertahankan atau meningkatkan IKU ini yaitu dengan merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan tematik lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan.

Salah satu upaya penyempurnaan/efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan pemanfaatan teknologi dan informasi layanan Aplikasi pemeriksaan berupa SIAP Kinerja. Manfaat yang diperoleh berupa kemudahan akses bagi satker dalam rangka penyelesaian dan arsip atas kerja kerja pemeriksaan.

IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Pegawai BPK dapat memahami visi, misi dan nilai dasar BPK. Metode pengukuran IKU adalah dengan penilaian dari hasil survei dengan

skala hasil survei, yaitu 1,00 - 1,99 adalah sangat tidak memuaskan, 2,00 - 2,99 adalah tidak memuaskan, 3,00 - 3,99 adalah memuaskan, dan 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan.

Sumber data yang digunakan adalah laporan hasil survei pengukuran indikator. Adapun perkembangan capaian IKU 7 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15 Perkembangan capaian IKU 7 Tahun 2020-2024

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Realisasi	4,57	4,49	4,67	4,70	-
Capaian Realisasi	91,4	89,9	93,4	94	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2023	91,4%	89,9%	93,4%	94%	-

Realisasi IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2023 sebesar 4,70 dari target 5,00 yang ditetapkan pada Tahun 2023 sehingga capaian realisasi sebesar 94%. Berdasarkan tabel tersebut realisasi ini mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Realisasi IKU 7 jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 telah mencapai 94%. Namun demikian, realisasi IKU 7 pada Tahun 2023 masih dibawah target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan kendala yang dialami dalam mencapai IKU ini bahwa dampak dari proses internalisasi kepada pegawai tentang pemahaman visi, misi, implementasi nilai-nilai dasar, dan kepatuhan terhadap kode etik serta peraturan lain masih kurang. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja IKU ini adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja serta memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai terkait implementasi visi, misi, dan nilai dasar BPK dalam berorganisasi di setiap kegiatan pembinaan oleh pimpinan.

Atas realisasi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan terus mendorong para pegawai untuk meningkatkan implementasi Nilai Dasar BPK dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif, mengadakan coaching dan mentoring kepada pegawai, agar nilai dasar BPK bisa lebih dipahami dan dimaknai, serta mengintegrasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai sehari-hari. Upaya penyempurnaan/efisiensi yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk terus mendorong pencapaian IKU ini adalah dengan mengoptimalkan pembinaan pegawai tentang pemahaman visi, misi dan implementasi nilai-nilai dasar serta berpartisipasi aktif dalam pengukuran indikator berbasis digital. Hal tersebut bermanfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran, responden lebih banyak sehingga survei lebih representatif dan hasil survei *realtime*.

IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama pada seluruh satuan kerja di BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja di BPK.

Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut.

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Tabel 16 Perkembangan capaian IKU 8 Tahun 2020-2024

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	86	87	88	89	90,05
Realisasi	94,80	93,14	92,30	88,00	-
Capaian Realisasi	105	105	104,8	98,88	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	105,27%	103,43%	103,36%	97,72%	-

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 17/ND/XI/01/2024 tanggal 15 Januari 2024, pencapaian IKU ini pada Tahun 2023 adalah A (Memuaskan) dengan skor 88,00 dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada skor 89 dan capaiannya sebesar 97,72%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, nilai ini mengalami penurunan. Realisasi IKU 8 jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 belum mencapai target yaitu sebesar 97,72%. Adapun kendala dalam mencapai kinerja IKU ini dikarenakan masih adanya hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian yaitu.

1. LAKIN BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 telah disusun sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 serta Nota Dinas Kepala Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja Nomor 38/ND/XII.1/01/2023, namun belum sepenuhnya menyajikan informasi kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;

2. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memadai yang setiap tahun, mengikuti kegiatan Forum Pengelola Renstra dalam rangka mengevaluasi indikator dan target kinerja serta mengikuti *sharing knowledge* untuk meningkatkan kinerja. Namun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti.
3. Terdapat tiga target Tahun 2022 yang tidak tercapai yaitu IKU 1, IKU 7, dan IKU 9.

Upaya yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah berkoordinasi dengan Direktorat PSMK dan Biro SDM secara berkala dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk setiap indikator kinerja yang dikunatifikasi, namun capaian IKU ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan.

Atas hasil evaluasi tersebut, untuk perbaikan pencapaian tahun selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen dan sesuai dengan rekomendasi Itama perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Berkoordinasi dengan Biro SDM untuk menyempurnakan cascading kinerja dari satuan kerja hingga ke level individu sesuai dengan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Meningkatkan kualitas penyusunan LAKIN Tahun 2023 dengan menambah informasi kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan terus melakukan perbaikan terhadap penyajian Laporan Kinerja tahun-tahun berikutnya dengan memperhatikan rekomendasi yang telah disampaikan sehingga tersaji informasi yang informatif dan relevan. Salah satu upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan memanfaatkan portal internet BPK dalam melakukan evaluasi dan penilaian SAKIP.

IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TI bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi umum (SISDM, JASMIN), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SIAP, SIPTL). Untuk mendorong *IT Culture* di BPK, seluruh satuan kerja diharapkan

memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong satuan kerja agar memanfaatkan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tabel 17 Perkembangan capaian IKU 9 Tahun 2020-2024

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	96%	97%	98%	100%
Realisasi	98,36%	98,36%	93,56%	99,19%	-
Capaian Realisasi	103,54	102,46	100,48	101,21	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	98,36%	98,36%	93,56%	99,19%	-

Realisasi IKU ini Tahun 2023 sebesar 99,19% dan telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 98,00%. sehingga capaiannya 99,19%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan nilai pada tahun sebelumnya sebesar 93,56%, namun belum mencapai target Tahun 2024. Penilaian IKU ini terdiri atas

- tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM sebesar 99,71%;
- tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN sebesar 95,10%;
- tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP sebesar 100%;
- tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SIAP sebesar 100%; dan
- tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL sebesar 99,93%.

Kendala dalam mencapai kinerja IKU ini adalah belum optimal penggunaan aplikasi JASMIN oleh Pejabat Struktural, pada aplikasi SISDM terdapat satu orang wajib lapor LHKPN yang tidak mengisi tanggal pelaporan sehingga tidak terbaca oleh sistem, dan pada aplikasi SiPTL terdapat bahan tindak lanjut yang statusnya unread (belum dibaca). Salah satu upaya yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencapai kinerja IKU ini adalah dengan meningkatkan kesadaran pegawai khususnya pejabat struktural dalam hal kualitas layanan aplikasi JASMIN melalui media komunikasi internal sehingga penggunaan layanan aplikasi JASMIN dapat berjalan dengan maksimal.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan TI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu upaya penyempurnaan/efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan menerapkan *IT Culture* melalui pemanfaatan layanan aplikasi umum (SISDM, JASMIN), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SIAP, SIPTL) yang telah disediakan oleh Biro TI. Manfaat yang dirasakan yaitu berupa kemudahan akses serta peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best Practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melalui proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh unit/satuan kerja selain pengusul BP. Aktivitas manajemen pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satuan kerja mempraktekkan manajemen pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Tabel 18 Perkembangan capaian IKU 10 Tahun 2020-2024

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	200%	100%	120%	115,83%	-
Capaian Realisasi	105	100	105	105	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	200%	100%	120%	115,83%	-

Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 sebesar 115,83% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan nilai pada tahun sebelumnya sebesar 120%, namun tetap mencapai target pada Tahun 2023. Realisasi IKU 10 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah

mencapai 115,83%. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun usulan *best practice* sebanyak 3 usulan, menerapkan *best practice* sebanyak 1 dan telah melaksanakan 10 jenis aktivitas manajemen pengetahuan dengan jumlah 36 aktivitas.

Adapun pencapaian realisasi ini berdasarkan realisasi Sub IKU berikut.

- a. Realisasi Sub IKU 10.1 tentang Tingkat Penyusunan/Penerapan BP sebesar 120%.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyusun BP yang berjudul “Tamukita sebagai Wadah Layanan Penerima Tamu dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan”. Berdasarkan Nota Dinas dari Dinas Kepala Direktorat PSMK Nomor 406/ND/XII.1/08/2023 Tanggal 7 Agustus 2023, diketahui bahwa usulan dan replikasi *best practice* sebagai capaian Indikator Kinerja “Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan” Tahun 2022 pada satuan kerja terkait telah diakui. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan juga mengusulkan dua Replikasi BP dengan judul “Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Bendahara pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023” dan “Pembangunan Sistem Informasi Klinik pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan”. Berdasarkan Nota Dinas dari Dinas Kepala Direktorat PSMK Nomor No.685/ND/XII.1/12/2023 Tanggal 6 Desember 2023, diketahui bahwa usulan replikasi *best practice* sebagai capaian Indikator Kinerja “Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan” Tahun 2023 pada satuan kerja terkait telah diakui.
- b. Realisasi Sub IKU 10.2 tentang Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (MP) sebesar 111,67%. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan 6 jenis aktivitas manajemen pengetahuan dengan jumlah 36 aktivitas dengan rincian sebagai berikut.
 - Bantuan rekan sejawat (*peer assist*) sebanyak 14 aktivitas;
 - Reviu pasca aktivitas (*after action review*) sebanyak 1 aktivitas;
 - Evaluasi kegiatan (*restropect*) sebanyak 1 aktivitas;
 - Komunitas praktisi (*community of practive*) sebanyak 5 aktivitas;
 - Wawancara berbasis pengetahuan sebanyak 1 aktivitas;
 - Forum berbagi pengetahuan sebanyak 2 aktivitas;
 - Coaching sebanyak 5 aktivitas;
 - Mentoring sebanyak 2 aktivitas;

- Diklat sebanyak 4 aktivitas; dan
- Blogging sebanyak 1 aktivitas.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, capaian IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 115,83% atau telah memenuhi target Renstra Tahun 2024.

Adapun kendala yang dialami dalam mencapai IKU ini yaitu.

1. Masih rendahnya keikutsertaan atau partisipasi pegawai pelaksanaan aktivitas MP;
2. Agen dan Admin MP masih harus proaktif dalam pelaksanaan aktivitas MP serta harus intensif mendokumentasikan aktivitas MP di sela kesibukan tupoksi lain; dan
3. Persyaratan bahwa untuk replikasi BP yang dapat diterima adalah memiliki nilai tambah/kebaruan. Diharapkan BP yang masih erjalan juga dapat diterima karena mempertahankan BP lebih sulit jika dibandingkan pada saat menyusun BP untuk pertama kali.

Upaya yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu secara aktif dan rutin melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berdasarkan jenis-jenis manajemen pengetahuan secara periodik setiap triwulan.

Upaya penyempurnaan/efisiensi yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam mempertahankan capaian IKU ini adalah dengan melakukan aktivitas sesuai jenis manajemen pengetahuan secara berkelanjutan setiap periodik (triwulan dan tahunan)

IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, Kerjasama, dan komunikasi yang dilakukan oleh perwakilan.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerja sama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan perwakilan.

Tabel 19 Perkembangan capaian IKU 11 Tahun 2020-2024

IKU 11	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024

Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi					
Target	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Realisasi	3,72	3,95	4,35	4,22	-
Capaian Realisasi	97,89	103,95	105	105	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	97,89%	103,95%	105%	105%	-

Berdasarkan tabel tersebut, Realisasi IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2023 sebesar 4,22 dari target 3,8 sehingga capaian realisasi sebesar 105%. Namun demikian, realisasi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 meskipun realisasi pada Tahun 2023 pada angka 4,22 lebih tinggi dari target 3,8 sehingga capaian realisasinya sebesar 105%. Namun demikian, realisasi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022. Realisasi IKU 11 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 105%. Hal ini menunjukkan kendala yang dialami dalam mencapai target IKU ini yaitu masih perlunya perbaikan kualitas komunikasi yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan kepada para pemangku kepentingan.

Adapun bentuk upaya yang telah dilakukan atau peningkatan kualitas komunikasi antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemahaman BPK atas kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan;
2. Melakukan standarisasi Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) dan pengelolaan media sosial;
3. Memfasilitasi pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga non pemerintah.

Salah satu upaya penyempurnaan/efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah perubahan metodologi survei yang semula berbasis manual menjadi digital. Dengan adanya perubahan ini terjadi efisiensi bagi internal BPK dan pihak surveyor. Perubahan ini bermanfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran, responden lebih banyak sehingga survei lebih representatif, dan hasil survei *realtime*. Sedangkan manfaat bagi pihak surveyor berupa efisiensi tenaga surveyor, pengolahan data survei lebih cepat, dan pemantauan pelaksanaan survei *realtime*.

IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi Pegawai BPK.

Tabel 20 Perkembangan capaian IKU 12 Tahun 2020-2024

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	-
Capaian Realisasi	100	100	100	100	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	-

Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 sebesar 100% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 100% sehingga capaiannya 100%. Realisasi ini tetap sebesar 100% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022. Realisasi IKU 12 bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai 100%.

Sebanyak 123 pegawai telah memenuhi jam diklat yang ditentukan. Adapun kendala yang dialami dalam mencapai target IKU ini yaitu.

1. Tawaran jenis diklat dari Badiklat/Balai Diklat terbatas, khususnya untuk Jabatan Fungsional Selain Pemeriksa (JFSP), tidak banyak tawaran diklat sesuai tupoksi JFSP, sehingga harus mengikuti diklat dari K/L lain. ;
2. Keikutsertaan diklat yang diselenggarakan oleh K/L lain harus dimintakan pengakuan JP ke Badiklat sehingga memerlukan waktu untuk pengakuan JP Diklat; dan
3. kegiatan pengembangan kompetensi lain selain yang bersifat formal/klasikal seperti melaksanakan bimbingan, coaching, mentoring, komunitas praktisi dan lain-lain belum bisa diakui sebagai JP.

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2023 untuk dapat memenuhi capaian IKU ini yaitu dengan melaksanakan diklat mandiri di Kantor Perwakilan dan mengikutsertakan pegawai pemeriksa maupun non pemeriksa pada diklat yang diselenggarakan oleh Badan/Balai Diklat secara distance learning. Selain itu, dilakukan monitoring secara berkala terhadap pemenuhan jam diklat pegawai.

Persentase realisasi IKU 12 pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Target Tahun 2024 sebesar 100%. IKU ini telah memenuhi target Tahun 2024. Dalam upaya mempertahankan pencapaian IKU 12 untuk setiap tahunnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berperan aktif dalam mengikutsertakan pegawai pemeriksa mengikuti diklat mandiri maupun diklat yang diselenggarakan Badan/Balai Diklat.

IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat kinerja anggaran mengukur capaian kinerja atas penggunaan anggaran satuan kerja yang memiliki dokumen anggaran atau DIPA mandiri yang terlihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. EPA adalah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada satuan kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Tabel 21 Perkembangan capaian IKU 12 Tahun 2020-2024

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87%	87,50%	88%	88,50%	88,70%
Realisasi	91,07%	91,38%	89,32%	91,11%	-
Capaian Realisasi	104,67	104,43	100,58	102,1	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	104,67%	103%	100,69%	102%	-

Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 sebesar 91,11% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 88,50% sehingga capaiannya 102,1%. Realisasi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 telah mencapai target sebesar 102%. Kendala dalam mencapai IKU ini yaitu.

1. Belum adanya keseragaman persepsi dan pemahaman dari unsur Manajemen dan Pelaksana terhadap pentingnya komponen EPA dan EKA dalam perhitungan IKU 13;
2. Belum adanya pemahaman yang komprehensif dari Manajemen dhi. Koodinator atau Pengelola IKU 13 dan Pelaksana terhadap perhitungan EPA dan EKA khususnya berkaitan dengan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang wajib dimutakhirkan melalui mekanisme Revisi Halaman III DIPA.

Penilaian IKU ini meliputi komponen nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 85,74% dan komponen nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sebesar 97,28%. Penilaian kinerja anggaran tersebut dilakukan oleh Biro Keuangan. Tercapainya target kinerja anggaran yang telah ditetapkan disebabkan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan upaya sebagai berikut.

- a. Komitmen bersama seluruh komponen satker (Manajemen dan Pelaksana) untuk selalu berusaha memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan; dan
- b. Pengelolaan manajemen kinerja atas aspek implementasi satker yang menjadi bagian penilaian indikator kinerja keluaran.

Untuk mempertahankan capaian kinerja anggaran ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan upaya sebagai berikut.

- a. Meningkatkan capaian keluaran dan indikator kinerja keluaran yang berkontribusi terhadap kinerja anggaran;
- b. Melakukan penelaahan kembali atas DIPA/POK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan melakukan perbaikan terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada tiap Rincian Output (RO) dengan memperhatikan penggunaan Bagan Akun Standar (BAS);
- c. Melakukan penyesuaian terhadap DIPA/POK, dengan melakukan revisi terhadap DIPA/POK dengan memperhatikan kebutuhan riil BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melalui kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan/atau DJA;
- d. Memastikan pencapaian volume RO sesuai dengan target kuantitas dan waktu pencapaian atau tepat volume dan tepat waktu;
- e. Menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan target kuantitas, kualitas, dan waktu sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah

- diinput ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), sehingga pengadaan barang dan jasa tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran;
- f. Mempercepat penyelesaian tagihan dari internal dan pihak ketiga sehingga mempercepat proses penggantian uang persediaan dan realisasi anggaran; dan
 - g. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak untuk peningkatan kinerja anggaran.

C. Analisis Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Strategi 2 yaitu **Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif** serta dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder* dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN, efisiensi anggaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

1. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Penerapan Teknologi dan Informasi dapat memberikan dampak yang signifikan pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja khususnya di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi mendukung segala aktivitas dapat dilaksanakan dengan cepat dan tentu saja dengan hasil yang baik, efektif, dan efisien.

Berikut upaya efisiensi yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi yang tercermin dalam IKU 9 diantaranya sebagai berikut.

- a. Mengoptimalkan layanan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang disediakan BPK. Pemanfaatan ini memberikan dampak pengelolaan administrasi dokumen lebih cepat, efektif, dan efisien.
 - Pemanfaatan aplikasi Jaringan Surat Menyurat Kedinasan (JASMIN)
Aplikasi JASMIN digunakan untuk mengelola surat menyurat kedinasan internal/eksternal BPK yang meliputi administrasi surat masuk, administrasi surat keluar, pendelegasian tugas dan tindak lanjut tugas. Hal ini sekaligus berdampak kepada efisiensi belanja operasional dan belanja pengiriman dokumen. Untuk pengiriman surat eksternal dapat memanfaatkan e-mail atau aplikasi pengiriman pesan pada handphone jika *contact person* sudah diketahui.

- Pemanfaatan Aplikasi Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP)

Aplikasi SiAP yang digunakan oleh pemeriksa dalam mendokumentasikan setiap tahapan pemeriksaan atau program kerja perorangan sampai dilakukan proses revidi secara berjenjang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP). Optimalisasi pemanfaatan aplikasi ini bermanfaat dalam menghemat anggaran belanja barang dan mempermudah pemerolehan keyakinan mutu atas setiap tahapan pemeriksaan oleh PFP, terstandar serta diperolehnya keyakinan yang memadai bahwa setiap prosedur pemeriksaan telah dilaksanakan.

- Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL)

Aplikasi SIPTL merupakan aplikasi atas pemantauan TLRHP yang dapat diakses oleh entitas yang diperiksa untuk mengunggah dokumen tindak lanjut dan memantau penetapan status tindak lanjut oleh BPK. Aplikasi ini juga digunakan oleh internal BPK untuk validasi dokumen, penelaahan, validasi tindak lanjut dan persetujuan penetapan status TLRHP secara berjenjang. Adanya perubahan metodologi pemantauan ini memberikan manfaat bagi internal BPK dan pihak entitas yang diperiksa. Manfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran belanja barang, fleksibilitas waktu validasi dan persetujuan status TLRHP secara berjenjang, serta pemantauan TLRHP bersifat *realtime*. Sedangkan manfaat bagi pihak entitas yang diperiksa berupa efisiensi anggaran belanja barang dan fleksibilitas waktu pemantauan status TLRHP.

- b. Penggunaan media daring untuk rapat dapat mengurangi biaya barang non operasional dan biaya barang operasional lainnya.

2. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Asas efisiensi pengelolaan BMN yaitu pengelolaan BMN diarahkan agar BMN digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Upaya yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam efisiensi BMN diantaranya yaitu.

- a. Mendokumentasikan dokumen secara digital. Hal ini memberikan dampak dimana pemenuhan sarana dan prasarana dapat lebih efisien dimana dapat mengurangi

belanja modal untuk pembelian lemari arsip atau sejenisnya dan ruang arsip dapat lebih efisien.

- b. Pemanfaatan BMN untuk pihak ketiga dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak;
- c. Melakukan pemindahtanganan atau penghapusan BMN yang sudah tidak lagi diperlukan untuk mengurangi biaya pemeliharaan.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengukuran efisiensi Pengelolaan BMN dengan menggunakan formula pengukuran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai efisiensi didapat dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengukuran efisiensi diukur atas Rincian Output (RO) yang diukur adalah Layanan Sarana Internal dengan alokasi anggaran sebesar Rp480.869.000,- dan nilai realisasi sebesar Rp480.474.000,- didapatkan Nilai Efisiensi atas RO ini sebesar 50,21%.

3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Manusia tidak hanya mengatur kebutuhan sumber daya pada setiap posisi. Namun, efisiensi SDM dapat meliputi seluruh aspek kegiatan untuk meningkatkan produktivitas. Secara sederhana dapat diasumsikan jika produktivitas sumber daya manusia tinggi, maka efisiensinya juga tinggi. Sebagai contoh, penempatan pegawai sesuai kemampuan dan beban unit kerja sehingga meningkatkan produktivitas. Selain itu, membuat lingkungan kerja dan ruang kerja yang nyaman dapat meningkatkan produktivitas kerja.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengukuran efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan menggunakan formula pengukuran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai efisiensi didapat dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengukuran efisiensi diukur atas Rincian Output (RO) yang diukur adalah Layanan Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.594.709.000,- dan

nilai realisasi sebesar Rp12.586.661.518,- didapatkan Nilai Efisiensi atas RO ini sebesar 50,16%.

4. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Menteri Keuangan menetapkan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi kualitas. Fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran (output) Program (setingkat K/L) dan efisiensi Keluaran (output) Kegiatan (setingkat Eselon II) meliputi:

1. Data capaian Keluaran (output) Program;
2. Data capaian Keluaran (output) Kegiatan;
3. Pagu Anggaran; dan
4. Realisasi Anggaran.

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam efisiensi penggunaan anggaran yang tercermin dalam IKU 13 diantaranya yaitu.

- a. Melakukan perencanaan anggaran yang tepat guna sehingga tercapainya output yang diinginkan. Seperti penganggaran belanja modal sesuai kebutuhan.
- b. Menganalisis kegiatan yang menjadi prioritas serta mendahulukan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya output.
- c. Melakukan efisiensi belanja barang operasional dengan pemanfaatan aplikasi TIK.
- d. Melakukan efisiensi belanja barang non operasional lainnya dengan melaksanakan kegiatan konsinyering penyusunan LHP di kantor.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengukuran efisiensi Penggunaan Anggaran dengan menggunakan formula pengukuran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai efisiensi didapat dengan membandingkan selisih

antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengukuran efisiensi diukur atas Rincian Output (RO) yang diukur adalah Layanan Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar RP23.785.178.000,- dan nilai realisasi sebesar RP23.772.386.787,- didapatkan Nilai Efisiensi atas RO ini sebesar 50,13%.

D. Perubahan Budaya Kerja

Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 mendapatkan skor kinerja sebesar 99,82 yang meliputi pencapaian 13 IKU membawa dampak pada perubahan budaya kerja di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Budaya kerja BPK Provinsi Kalimantan Selatan selama ini telah menerapkan nilai-nilai dasar BPK, yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu, sesuai arahan dari Presiden RI dengan meluncurkan Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN, yaitu ASN yang BerAKHLAK, yang memiliki makna Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ikut serta dalam menanamkan nilai-nilai dasar ASN tersebut kepada seluruh pegawai.

Melalui capaian kinerja pada Tahun 2023, diharapkan dapat menunjang budaya kerja SMART (Sinergi, Melayani, Akuntabel, Responsible, Transparan) pada pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain melalui kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, keterlibatan dalam pemeriksaan tematik nasional dan tematik lokal, dan penerapan manajemen pengetahuan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dan perbaikan kualitas pengelolaan anggaran.

E. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis dan sasaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, diperlukan dukungan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dukungan anggaran tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Anggaran (Setelah Perubahan)	Realisasi Anggaran	Realisasi Rincian Output		Indikator Kinerja
			Rincian Output	Realisasi	
1	Rp10.709.600.000,-	Rp 10.705.251.269,-	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	Rp224.380.131,-	IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
2			Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	Rp2.022.500,-	
3			Sumbangan IHPS Perwakilan	Rp46.032.206,-	IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
4			Laporan Profil Entitas Perwakilan	Rp3.130.500,-	
5			Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan	Rp131.800.000,-	
6			Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah pada BPK Perwakilan	Rp227.264.850,-	IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
7			Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	Rp337.005.196,-	IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
8			Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Rp1.410.425.586,-	
9			LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.887.018.147,-	IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
10			LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	Rp2.436.172.153,-	IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
11	Rp12.594.709.000,-	Rp12.586.661.518,-		Rp12.586.661.518,-	IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

No	Anggaran (Setelah Perubahan)	Realisasi Anggaran	Realisasi Rincian Output		Indikator Kinerja
			Rincian Output	Realisasi	
			Layanan Perkantoran		IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
12			Layanan Sarana Internal	Rp480.474.000,-	IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

F. Inovasi

Pada Tahun 2023, Usulan *Best Practice* BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan judul *TamuKita Sebagai Wadah Layanan Penerima Tamu dengan Pemanfaatan TI* telah ditetapkan sebagai *Best Practice* berdasarkan Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK Nomor 406/ND/XII.1/08/2023 Tanggal 7 Agustus 2023. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan juga mengusulkan dua Replikasi BP dengan judul “Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Bendahara pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023” dan “Pembangunan Sistem Informasi Klinik pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan”. Berdasarkan Nota Dinas dari Dinas Kepala Direktorat PSMK Nomor

No.685/ND/XII.1/12/2023 Tanggal 6 Desember 2023, diketahui bahwa usulan replikasi *best practice* telah diakui sebagai capaian Indikator Kinerja “Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan” Tahun 2023 pada satuan kerja terkait telah diakui.

G. Penghargaan

Penghargaan yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah.

1. Daftar Penghargaan Internal yang diperoleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.

Tabel 23 Daftar Penghargaan Internal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

No	Nama Penghargaan	Peringkat	Nama Penyelenggara
1	Pengelola UJDIH Terbaik Tahun 2022	I	Ditama Binbangkum
2	Pengelola Database Peraturan BPK Terbaik Tahun 2022	II	Ditama Binbangkum
3	UJDIH Perwakilan Zona Hijau Tahun 2022		Ditama Binbangkum

2. Daftar Penghargaan Eksternal yang diperoleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 antara lain.

Tabel 24 Daftar Penghargaan Eksternal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

No	Nama Penghargaan	Peringkat	Nama Penyelenggara
1	Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Semester I Tahun 2023	3	KPPN Banjarmasin
2	Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 (Pagu Besar)	3	KPPN Banjarmasin
3	Bendahara Pengeluaran Semester I Tahun 2023 (Pagu Besar)	3	KPPN Banjarmasin
4	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Kategori Kecil)	3	KPPN Banjarmasin

BAB IV PENUTUP

A. Pencapaian Skor Kinerja Tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Secara Umum

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan kontribusi untuk penyusunan Laporan Kinerja AKN VI BPK sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. Strategi Pemecahan Masalah serta Rencana Aksi Pemenuhan Target Periode Berikutnya

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan upaya-upaya untuk mencapai target kinerja dan akan terus berusaha mempertahankan kinerja yang sudah memenuhi target serta meningkatkan kinerja pada capaian IKU yang belum memenuhi target dengan cara meningkatkan pemahaman dan penerapan visi, misi dan nilai dasar BPK serta meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerja sama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja BPK RI di masa mendatang.

Banjarbaru, 31 Januari 2024

Manajer IKU



Saiful Munir

NIP 197507312002121004

Mengetahui,
Kepala Perwakilan



Rahmadi

NIP 196812101996031002 

LAMPIRAN

**SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023**

Perspektif, SS, dan IKU		Target	Realisasi	Skor	Skor Kinerja
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan					99,82
Sasaran Kegiatan					99,82
1.	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	82%	82	
2.	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100	
3.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	78,69%	104,92	
4.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,85%	100,85	
5.	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100	
6.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,13%	100,13	
7.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,70	94	
8.	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)	88%	98,88	
9.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	99,19%	101,21	
10.	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	115,83	105	
11.	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	4,22	105	
12.	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100	
13.	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88,50%	90,36%	102,1	

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA
TAHUN 2023

Unit/Satuan Kerja : Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun : 2023

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif						
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi						
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember Januari: - Melakukan penyusunan tim pemeriksaan interim LKPD - Melaksanakan diklat pemeriksaan LKPD sebagai pembekalan bagi tim Februari: - Melaksanakan pemeriksaan interim LKPD sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) - Melaksanakan Pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022 (banparpol TA 2022) sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) Maret: - Menyusun laporan hasil pemeriksaan interim LKPD - Menyusun LHP pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022 (banparpol TA 2022) - Melaksanakan serah terima kertas kerja pemeriksaan dari pemeriksa kepada kepala subauditorat (pejabat struktural pemeriksa/PSP) setelah dilakukan review berjenjang antara tim pemeriksa serta di-review oleh PSP sesuai persyaratan quality

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TWII	TWIII	TWIV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								assurance (QA); • Pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol TA 2022 • Pemeriksaan interim/pendahuluan LKPD 2022 • Menerima LKPD dari entitas • Menyusun P2 terinci LKPD • Melaksanakan pemeriksaan terinci LKPD dan melakukan proses QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan April: • Melaksanakan pemeriksaan terinci LKPD dan melakukan proses QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan • Melaksanakan review berjenjang dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa (PFP) atas setiap tahapan pemeriksaan (quality control/QC) sesuai standard dan terdokumentasi • Menyusun konsep LHP terinci LKPD rencana aksi dan konsep surat keluar untuk entitas yang menyerahkan LKPD awal maret 2023 (Tahap 1) Mei: • Menyerahkan LHP atas LKPD (Tahap 1) • Melaksanakan serah terima kertas kerja pemeriksaan dari pemeriksa kepada kepala subauditorat (pejabat struktural pemeriksa/PSP) setelah dilakukan review berjenjang antara tim pemeriksa serta di-review oleh PSP sesuai persyaratan quality assurance (QA) – Tahap 1 • Menyerahkan LHP atas LKPD (Tahap 2) • Melaksanakan serah terima kertas kerja pemeriksaan dari pemeriksa kepada kepala subauditorat (pejabat struktural pemeriksa/PSP) setelah dilakukan review berjenjang antara tim pemeriksa serta di-review oleh PSP sesuai persyaratan quality assurance (QA) – Tahap 2 Juni: • Menyusun bahan IHPS I Tahun 2023 atas pemeriksaan LKPD • Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2023 Juli: • Koordinasi dengan Pokja AKN berkenaan dengan rencana kegiatan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Signifikan lainnya, Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja mandiri, dan PDTT Pendahuluan tematik nasional • Menyusun P2 Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Signifikan lainnya, Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja mandiri, dan PDTT Pendahuluan tematik nasional Agustus: • Melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Signifikan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I	TW II	TW III	TW IV	(8)	(9)
								lainnya, Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja mandiri, dan PDTT Pendahuluan tematik nasional - Melakukan proses QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan - Melaksanakan review berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan pemeriksaan (QC) sesuai standard dan terdokumentasikan September: - Menyusun LHP Pendahuluan Kinerja Signifikan lainnya, Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja mandiri, dan PDTT Pendahuluan tematik nasional - Melaksanakan serah terima kertas kerja Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Signifikan lainnya, Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja mandiri, dan PDTT Pendahuluan tematik nasional dari pemeriksa kepada PSP setelah dilakukan peer review antaran tim pemeriksa serta di- review oleh PSP sesuai persyaratan QA - Koordinasi dengan Pokja AKN berkenaan dengan rencana kegiatan Pemeriksaan Terinci Kinerja Signifikan lainnya, Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja mandiri, dan PDTT Pendahuluan tematik nasional - Menyusun P2 Pemeriksaan Terinci Kinerja Signifikan lainnya, Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja mandiri, dan PDTT Pendahuluan tematik nasional Oktober: - Melaksanakan Pemeriksaan Terinci Kinerja Signifikan lainnya, Pemeriksaan Terinci Kinerja mandiri, dan PDTT Terinci tematik nasional - Melaksanakan review berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan pemeriksaan (QC) atas pemeriksaan Pemeriksaan Terinci Kinerja Signifikan lainnya, Pemeriksaan Terinci Kinerja mandiri, dan PDTT Terinci tematik nasional sesuai standard dan terdokumentasikan November: - Melaksanakan Pemeriksaan Terinci Kinerja Signifikan lainnya, Pemeriksaan Terinci Kinerja mandiri, dan PDTT Terinci tematik nasional - Melaksanakan review berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan pemeriksaan (QC) atas pemeriksaan Pemeriksaan Terinci Kinerja Signifikan lainnya, Pemeriksaan Terinci Kinerja mandiri, dan PDTT Terinci tematik nasional sesuai standard dan terdokumentasikan - Koordinasi dengan Pokja AKN berkenaan dengan penyusunan LHP Terinci Kinerja Signifikan lainnya, Pemeriksaan Terinci Kinerja mandiri, dan PDTT Terinci tematik nasional termasuk konsep rekomendasi atas temuan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I	TW II	TW III	TW IV	(8)	(9)
								Desember: - Menyusun konsep LHP terinci Kinerja Signifikan lainnya, Pemeriksaan Terinci Kinerja mandiri, dan PDTT Terinci tematik nasional rencana aksi dan konsep surat keluar - Menyerahkan LHP Pemeriksaan Terinci Kinerja mandiri, dan PDTT Terinci tematik nasional - Melaksanakan serah terima kertas kerja Pemeriksaan Terinci Kinerja Signifikan lainnya, Pemeriksaan Terinci Kinerja mandiri, dan PDTT Terinci tematik nasional dari pemeriksa kepada PSP setelah dilakukan peer review antara tim pemeriksa serta di-review oleh PSP sesuai persyaratan QA
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	-	-	-	100%		Januari – Maret: - Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2023 - Melaksanakan review berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan pemeriksaan banparpol TA 2022 sesuai harapan penugasan yang tertuang dalam program pemeriksaan (P2) - Melakukan pembahasan bersama antara penanggung jawab (PJ), wakil penanggung jawab (WPJ), pengendali teknis (PT), dan tim untuk menetapkan simpulan pemeriksaan banparpol - Melaksanakan review berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan pemeriksaan LKPD TA 2022 sesuai harapan penugasan yang tertuang dalam P2 - Melakukan pembahasan bersama antara PJ, WPJ, PT, dan tim untuk menyusun laporan hasil pemeriksaan interim April – Juni: - Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Semester II Tahun 2023 - Melaksanakan review berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan pemeriksaan LKPD TA 2022 sesuai harapan, penugasan yang tertuang dalam P2 - Melakukan pembahasan bersama antara PJ, WPJ, PT, dan tim untuk menetapkan opini Juli - September: - Melaksanakan review berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan pemeriksaan atas Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Signifikan lainnya, Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja mandiri, dan PDTT Pendahuluan tematik nasional sesuai harapan penugasan yang tertuang dalam P2

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TWII	TWIII	TWIV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Oktober – Desember: - Melaksanakan review berjenjang dilakukan oleh PFP atas setiap tahapan pemeriksaan atas Pemeriksaan Terinci Kinerja Signifikan lainnya, Pemeriksaan Terinci Kinerja mandiri, dan PDTT Terinci tematik nasional sesuai harapan penugasan yang tertuang dalam P2 - Melakukan pembahasan bersama antara PJ, WPJ, PT, dan tim untuk menetapkan simpulan/rekomendasi
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%		Januari – Maret: - Melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan inspektorat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait posisi TLRHP dan rencana aksi penyelesaiannya April – Juni: - Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL - Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL - Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS). - Melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) Semester I Tahun 2022 - Memetakan status 2, 3, dan 4 TLRHP terutama persentase dibawah 75% - Melaksanakan pembahasan TLRHP dengan entitas - Mengefektifkan TLRHP melalui aplikasi SIPTL Juli – September: - Melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan inspektorat dan SKPD terkait tentang posisi TLRHP Semester I Tahun 2023 dan rencana aksi penyelesaiannya Oktober – Desember: - Melaksanakan TLRHP Semester II Tahun 2023 - Memetakan status 2, 3, dan 4 TLRHP terutama persentase dibawah 75% - Melaksanakan pembahasan TLRHP dengan entitas - Mengefektifkan TLRHP melalui aplikasi SIPTL
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	50%	100%		Januari – Maret: - Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional April – Juni: - Melaksanakan koordinasi perubahan Pemeriksaan LFAR dengan memperhatikan kebijakan pimpinan Juli – September: - Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan tematik nasional sesuai RKP TA 2023 yaitu pada Pemeriksaan PDTT maupun Kinerja

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Oktober – Desember: Melaksanakan pemeriksaan terinci tematik nasional sesuai RKP TA 2023 yaitu pada Pemeriksaan DTT maupun Kinerja
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%		Januari – Maret: - Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan - Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan - BPK Perwakilan Kalimantan Selatan berkomitmen untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan setelah memperoleh persetujuan dari Pimpinan dan dukungan anggaran yang memadai dari BPK Pusat April – Juni: - BPK Perwakilan Kalimantan Selatan berkomitmen untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan setelah memperoleh persetujuan dari Pimpinan dan dukungan anggaran yang memadai dari BPK Pusat Juli – September: - BPK Perwakilan Kalimantan Selatan berkomitmen untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan setelah memperoleh persetujuan dari Pimpinan dan dukungan anggaran yang memadai dari BPK Pusat - Melakukan pemeriksaan pendahuluan atau awal atas pemeriksaan sesuai harapan pemangku kepentingan Oktober – Desember: - BPK Perwakilan Kalimantan Selatan berkomitmen untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan setelah memperoleh persetujuan dari Pimpinan dan dukungan anggaran yang memadai dari BPK Pusat - Melakukan pemeriksaan terinci atau lanjutan atas pemeriksaan sesuai harapan pemangku kepentingan - Melaksanakan serah terima kertas kerja pemeriksaan dari pemeriksa kepada kepala subauditorat (pejabat struktural pemeriksa/PSP) setelah dilakukan review berjenjang antara tim pemeriksa serta di-review oleh PSP sesuai persyaratan quality assurance (QA)
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam	100%	-	-	50%	100%		Januari – Maret: - Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal April – Juni: - Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal
	Pemeriksaan Tematik Lokal							Juli – September: Melaksanakan pemeriksaan tematik lokal (pendahuluan) sesuai RKP TA 2022

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TWII	TWIII	TWIV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Oktober – Desember: - Melaksanakan pemeriksaan tematik lokal (terinci) sesuai RKP TA 2022 - Melaksanakan serah terima kertas kerja pemeriksaan dari pemeriksa kepada kepala subauditorat (pejabat struktural pemeriksa/PSP) setelah dilakukan review berjenjang antara tim pemeriksa serta di-review oleh PSP sesuai persyaratan quality assurance (QA)
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)		Januari – Maret: - Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD. - Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP - Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja - Memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai terkait implementasi visi, misi, dan nilai dasar BPK dalam berorganisasi di setiap kegiatan pembinaan oleh pimpinan sebelum pemeriksaan LKPD April – Juni: - Pakta Integritas seluruh Tim Pemeriksa saat pemeriksaan terinci LKPD - Memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai terkait implementasi visi, misi, dan nilai dasar BPK dalam berorganisasi di setiap kegiatan pembinaan oleh pimpinan sebelum pemeriksaan LKPD Terinci Juli – September: - Sosialisasi nilai dasar IIP dan budaya kerja Oktober – Desember: - Mengikuti kegiatan survey pemahaman dan implementasi Nilai Dasar BPK
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)	-	-	-	A (89,00)		Januari – Maret: - Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2023 - Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku - Menyusun laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja Tahun 2022 - Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2022 kepada Itama untuk dievaluasi April – Juni: - Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku - Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I 2022 dan Rencana

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi - Melakukan penilaian mandiri melalui e-SAKIP - Menyampaikan dokumen tindak lanjut hasil evaluasi Itama atas laporan sistem akuntabilitas kinerja satuan kerja Tahun 2022 - Melakukan monitoring atas capaian kinerja Triwulan I Juli – September: - Meng-input hasil evaluasi AKIP oleh Itama ke formulir input capaian kinerja - Melakukan monitoring atas capaian kinerja Triwulan II Oktober – Desember: - Melakukan monitoring atas capaian kinerja Triwulan III - Menyiapkan bahan untuk penyusunan Lakin 2023
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	28%	93%	95%	98%		Januari – Maret: - Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persuratan, dsb (SIAP LK, SIAP Banparpol) - Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan - Menyusun laporan bulanan budaya teknologi informasi - Menyusun laporan e-audit - Melakukan pemutakhiran data SISDM berkenaan dengan bukti pelaporan SPT dan LHKPN April – Juni: - Menyusun laporan bulanan budaya teknologi informasi - Menyusun laporan e-audit Juli – September: - Menyusun laporan bulanan budaya teknologi informasi - Menyusun laporan e-audit Oktober – Desember: - Menyusun laporan bulanan budaya teknologi informasi - Menyusun laporan e-audit
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	25% (minimal)	37,5% (minimal)	50% (minimal)	100%	*minimal 4 jenis aktivitas manajemen pengetahuan yang berbeda dalam tahun berjalan	Januari – Maret: - Evaluasi Penerapan <i>Best Practice</i> tahun 2022 - Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> di Perwakilan - Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan, yaitu: - Diklat Pemeriksaan LKPD TA 2022 - Bantuan Rekan Sejawat - Reviu Pasca Aktivitas Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa. - Menyusun Laporan Manajemen Pengetahuan Triwulan I April – Juni: - Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan, yaitu Mentoring Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Evaluasi Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Pemeriksa. - Menyusun Laporan Manajemen Pengetahuan Triwulan II. Juli – September: - Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan, yaitu Forum Berbagi Pengetahuan. - Menyusun Laporan Manajemen Pengetahuan Triwulan III. Oktober – Desember: - Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan, yaitu Komunitas Praktisi. - Menyampaikan usulan <i>best practice</i> kepada Ditama Revbang (Direktorat PSMK). - Menyampaikan usulan replikasi <i>best practice</i> kepada Ditama Revbang (Direktorat PSMK). - Menyusun Laporan Manajemen Pengetahuan Triwulan IV.
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)		Januari – Maret: - Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit - Melaksanakan survey tingkat kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan publik yang diberikan BPK perwakilan April – Juni: - Melaksanakan survey tingkat kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan publik yang diberikan BPK perwakilan - Menyampaikan kuesioner kepuasan pemilik kepentingan atas kinerja BPK terkait hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2022 kepada <i>auditee</i> Juli – September: - Melaksanakan survey tingkat kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan publik yang diberikan BPK perwakilan Oktober – Desember: - Melaksanakan survey tingkat kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan publik yang diberikan BPK perwakilan - Menyampaikan kuesioner kepuasan pemilik kepentingan atas kinerja BPK terkait hasil pemeriksaan tematik nasional dan non tematik serta PDDT kepada <i>auditee</i>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja								Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I		TW II		TW III		TW IV		(8)	(9)
												kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang telah disetujui Badiklat PKN. Juni : • Mengajukan usulan peserta diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai. • Menyusun monitoring pemenuhan jam diklat pegawai berdasarkan sertifikat diklat, <i>workshop</i>, beranda ilmu, dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang telah disetujui Badiklat PKN. Juli : • Mengajukan usulan peserta diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai. • Menyusun monitoring pemenuhan jam diklat pegawai berdasarkan sertifikat diklat, <i>workshop</i>, beranda ilmu, dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang telah disetujui Badiklat PKN. Agustus : • Mengajukan usulan peserta diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai. • Menyusun monitoring pemenuhan jam diklat pegawai berdasarkan sertifikat diklat, <i>workshop</i>, beranda ilmu, dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang telah disetujui Badiklat PKN. September : • Mengajukan usulan peserta diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai. • Menyusun monitoring pemenuhan jam diklat pegawai berdasarkan sertifikat diklat, <i>workshop</i>, beranda ilmu, dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang telah disetujui Badiklat PKN. Oktober : • Mengajukan usulan peserta diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai. • Menyusun monitoring pemenuhan jam diklat pegawai berdasarkan sertifikat diklat, <i>workshop</i>, beranda ilmu, dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang telah disetujui Badiklat PKN.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja								Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I		TW II		TW III		TW IV		(8)	(9)
												disetujui Badiklat PKN.
												November : - Mengajukan usulan peserta diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. - Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai. - Menyusun monitoring pemenuhan jam diklat pegawai berdasarkan sertifikat diklat, <i>workshop</i>, beranda ilmu, dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang telah disetujui Badiklat PKN. Desember : - Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai, yaitu Diklat Pemeriksaan LKPD TA 2023. - Mengajukan usulan peserta diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. - Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai. - Menyusun monitoring pemenuhan jam diklat pegawai berdasarkan sertifikat diklat, <i>workshop</i>, beranda ilmu, dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang telah disetujui Badiklat PKN.
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,5%	88,5%		88,5%		88,5%		88,5%			Januari – Maret: - Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2023 dan Kebijakan TA. 2023 - Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran - Menyusun data capaian output. - Menyusun laporan bulanan realisasi DIPA/POK satuan kerja untuk memantau penyerapan anggaran - Menyusun rencana penarikan dana per bulan untuk memantau konsistensi antara perencanaan dan implementasi - Menyusun laporan bulanan penyelesaian keluaran DIPA untuk memantau pencapaian keluaran - Menyusun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan satuan kerja untuk memantau realisasi dan pagu anggaran serta realisasi dan target volume keluaran - Mengikuti kegiatan forum Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Forjala) evaluasi Tahun 2022 dengan output bahan materi Forjala dari Biro Keuangan April – Juni: - Menyusun laporan bulanan realisasi DIPA/POK satuan kerja untuk memantau penyerapan anggaran - Menyusun rencana penarikan dana per bulan untuk memantau konsistensi antara perencanaan dan implementasi

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TWII	TWIII	TWIV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								- Menyusun laporan bulanan penyelesaian keluaran DIPA untuk memantau pencapaian keluaran - Menyusun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan satuan kerja untuk memantau realisasi dan pagu anggaran serta realisasi dan target volume keluaran - Mengikuti kegiatan forum Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Forjala) evaluasi Triwulan I Tahun 2023 dengan output bahan materi Forjala dari Biro Keuangan - Menyusun RKA Tahun 2024 berdasarkan Pagu Indikatif Juli – September: - Menyusun laporan bulanan realisasi DIPA/POK satuan kerja untuk memantau penyerapan anggaran - Menyusun rencana penarikan dana per bulan untuk memantau konsistensi antara perencanaan dan implementasi - Menyusun laporan bulanan penyelesaian keluaran DIPA untuk memantau pencapaian keluaran - Menyusun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan satuan kerja untuk memantau realisasi dan pagu anggaran serta realisasi dan target volume keluaran - Mengikuti kegiatan forum Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Forjala) evaluasi Triwulan II Tahun 2023 dengan output bahan materi Forjala dari Biro Keuangan - Menyusun RKA Tahun 2024 berdasarkan Pagu Anggaran Oktober – Desember: - Menyusun laporan bulanan realisasi DIPA/POK satuan kerja untuk memantau penyerapan anggaran - Menyusun rencana penarikan dana per bulan untuk memantau konsistensi antara perencanaan dan implementasi - Menyusun laporan bulanan penyelesaian keluaran DIPA untuk memantau pencapaian keluaran - Menyusun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan satuan kerja untuk memantau realisasi dan pagu anggaran serta realisasi dan target volume keluaran - Mengikuti kegiatan forum Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Forjala) evaluasi Triwulan III Tahun 2023 dengan output bahan materi Forjala dari Biro Keuangan

Keterangan:

- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut IKU Unit/Satuan Kerja.
- Kolom (2) : Diisi dengan nomenklatur IKU Unit/Satuan Kerja.
- Kolom (3) : Diisi dengan Target Tahun 2023
- Kolom (4) s.d. (7) : Diisi dengan target maksimal setiap triwulan dengan memperhatikan proses bisnis Unit/Satuan Kerja dan juga target tahunan.



**BPK PERWAKILAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



www.kalsel.bpk.go.id



Jl. A. Yani Km. 32,5, - Banjarbaru, 70712



Telp. (0511) 4784295, Fax. (0511) 4784296